

## **DINAMIKA GEOPOLITIK DAN IMPLIKASINYA: ANALISIS RIVALITAS AS-RRT DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA**

**Putra Iman Didada<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the geopolitical dynamics and rivalry between the United States (US) and the People's Republic of China (PRC) in the South China Sea and its implications for Indonesia's strategic interests. The South China Sea is a highly strategic area rich in natural resources, making it a focal point of power struggle between these two major powers. Although Indonesia is not directly involved in the territorial disputes in the South China Sea, the rivalry between the US and the PRC impacts Indonesia, particularly in terms of territorial sovereignty, maritime economy, and regional stability. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, analyzing official documents, scholarly publications, and relevant reports. The primary focus of this study is to identify the military, economic, and diplomatic strategies employed by the US and the PRC in the region and their effects on Indonesia. This study also examines Indonesia's foreign policy response in maintaining neutrality and addressing the challenges posed by the rivalry between the two great powers. The findings of this research are expected to provide a deeper understanding of Indonesia's role in maintaining regional stability and strengthening its adaptive foreign policy in response to the evolving global geopolitical landscape.

**Keywords: Geopolitics, US-PRC Rivalry, South China Sea, Indonesia's Sovereignty, Maritime Security, Diplomatic Strategy, Exclusive Economic Zone (EEZ) of Natuna, Militarization of the South China Sea, Maritime Diplomacy.**

### **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika geopolitik dan rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Cina Selatan serta implikasinya terhadap kepentingan strategis Indonesia. Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam, menjadikannya titik fokus perebutan kekuasaan antara kedua kekuatan besar ini. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, rivalitas antara AS dan RRT berdampak terhadap Indonesia, terutama dalam hal kedaulatan wilayah, ekonomi maritim, dan stabilitas regional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, menganalisis dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan laporan relevan. Fokus utama studi ini adalah mengidentifikasi strategi militer, ekonomi, dan diplomatik yang diterapkan AS dan RRT di kawasan tersebut serta dampaknya terhadap Indonesia. Studi ini juga mengkaji respons kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjaga netralitas dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh rivalitas kedua kekuatan besar ini. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Indonesia dalam menjaga stabilitas regional dan memperkuat kebijakan luar negerinya yang adaptif dalam menanggapi lanskap geopolitik global yang terus berkembang.

**Kata Kunci: Geopolitik, Rivalitas AS-RRT, Laut Cina Selatan, Kedaulatan Indonesia, Keamanan Maritim, Strategi Diplomatik, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna, Militerisasi Laut Cina Selatan, Diplomasi Maritim**

### **PENDAHULUAN**

Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu kawasan maritim yang paling strategis dan diperebutkan dunia. Posisi geografis yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadikan kawasan ini sebagai jalur pelayaran internasional yang krusial. Menurut data dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), sekitar 30% perdagangan global lewat laut yang senilai lebih USD 3 triliun per tahun yang melintasi kawasan ini (*Center for Strategic and International Studies* (CSIS) 2020). Selain itu, Laut China Selatan juga kaya akan

sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang belum dieksplorasi secara maksimal serta sumberdaya hayati laut, diantaranya perikanan yang menjadikannya wilayah dengan kepentingan ekonomi dan strategis tinggi.

Kawasan ini telah lama menjadi titik panas konflik geopolitik karena tumpang tindih di klaim kedaulatan oleh sejumlah negara. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim hampir 90% adalah wilayah Laut China Selatan melalui konsep “*Nine-Dash Line*” yang tidak diakui oleh negara-negara tetangga, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Klaim ini juga telah ditolak secara hukum oleh Mahkamah Arbitrase Internasional di dalam putusan Tahun 2016 yang memenangkan Filipina, menyatakan bahwa klaim RRT tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS 1982 (Permanent Court of Arbitration (2016)).

Sementara itu, Amerika Serikat menolak klaim sepihak Tiongkok dan secara konsisten melakukan kebijakan *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) Laut China Selatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan prinsip kebebasan navigasi dan menantang klaim teritorial yang dianggap tidak sah oleh hukum laut internasional. Amerika Serikat (AS) memperkuat kehadiran militernya di kawasan Asia-Pasifik, membangun aliansi dengan negara Asia Tenggara, serta Indo-Pasifik, seperti Jepang, Australia, India (melalui Quad), dan Filipina. Rivalitas AS dan RRT pun tidak hanya berdimensi militer, tetapi juga ekonomi, teknologi, dan pengaruh diplomatik, mencerminkan kompetisi dua kekuatan besar dunia dalam membentuk tatanan global baru (Friedberg 2022).

Dua kekuatan besar (AS dan RRT) yang berkonflik berimbas pada Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang geografis ada di wilayah yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukan berpihak secara langsung dalam sengketa klaim wilayah, sebagian klaim *Nine-Dash Line* RRT tumpang tindih dengan *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara. Salah satu contohnya ialah insiden pelanggaran oleh kapal penjaga pantai dan nelayan RRT yang memasuki wilayah ZEE Indonesia sehingga kerap memicu ketegangan diplomatik dan kekhawatiran atas kedaulatan nasional (Kemlu RI 2020).

Permasalahan ketegangan diplomatik antara Indonesia dengan RRT di Tahun 2019 dan awal 2020, kapal-kapal RRT diketahui berlayar dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna, kemudian memicu pengerahan kapal TNI AL oleh Indonesia dan pernyataan tegas dari Kementerian Luar Negeri RI (Anwar 2020). Di sisi lain, Indonesia berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan kedua kekuatan besar tersebut. RRT adalah mitra dagang terbesar Indonesia, sedangkan AS adalah mitra strategis dan penting di dalam isu-isu, seperti: keamanan maritim, penegakan hukum laut, dan kebebasan navigasi. Posisi ini juga menempatkan Indonesia dalam situasi yang kompleks dan penuh dilemah geopolitik. Di satu sisi, Indonesia harus mempertahankan kedaulatan dan hak daulat wilayah, namun di sisi lain, Indonesia juga harus bersikap hati-hati saat menjaga hubungan luar negerinya sehingga tidak memihak salah satu pihak secara terbuka.

Dalam kerangka regional, Indonesia aktif mendorong penyelesaian konflik dengan melalui pendekatan diplomatik dan penguatan kerjasama ASEAN. Namun, efektivitas ASEAN untuk merespons dinamika Laut China Selatan masih diragukan karena tidak ada sikap kolektif yang tegas terhadap agresivitas RRT, serta adanya ketergantungan ekonomi yang tinggi dari beberapa negara anggota kepada Beijing (Goh 2019) Inisiatif di ASEAN untuk menyusun *Code of Conduct* (CoC) bersama RRT berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil konkret di dalam mengurangi ketegangan di lapangan. Maka dari itu, Indonesia perlu membangun kebijakan luar negeri bahkan pertahanan maritim yang adaptif dan proaktif.

Kebijakan luar negeri dan pertahanan maritim menggunakan pendekatan *non-claimant but concerned state* perlu dievaluasi ulang dalam konteks rivalitas antara AS dengan RRT yang makin

tajam. Selain itu, penguatan kapasitas pertahanan laut, diplomasi maritim bahkan pengelolaan sumber daya di wilayah perbatasan menjadi langkah yang sangatlah penting untuk memastikan kepentingan Nasional Indonesia tetap terlindungi. Agar problem rivalitas AS-RRT di Laut China Selatan membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, akan tetapi ketegangan AS-RRT berpotensi memecah konsensus regional, yang memperburuk persaingan kekuatan militer di laut, bahkan menghambat kerjasama ekonomi dan pembangunan regional.

Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di negara-negara ASEAN mempunyai peranan kunci untuk mendorong tatanan kawasan yang damai, terbuka dan berbasis aturan (*Rules-based order*). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam dan kritis terhadap dinamika geopolitik rivalitas AS-RRT di Laut China Selatan dengan fokus kepada bagaimana situasi tersebut mempengaruhi kepentingan strategis Indonesia, baik di dalam aspek kedaulatan wilayah, keamanan nasional, hubungan luar negeri, serta stabilitas regional saat menghadapi tantangan geopolitik yang terus berkembang.

## **KERANGKA ANALITIK**

Konsep kekuatan laut tidak terlepas atas pemahaman *Sea Power Theory* dari Alfred Thayer Mahan seorang ahli maritim Amerika Serikat, "*Sea Power*" pertama kali muncul akhir abad 19 oleh Raer Admiral Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1753*. Alfred T Mahan dalam buku yang berjudul "*The Influence of Sea Power Upon History 1660-1753*" terbit tahun 1890 yang mengatakan bahwa betapa pentingnya peran laut sebagai aspek kekuatan sebuah bangsa (Mahan 1890). Menurut Alfred Thayer Mahan (1840-1914), menjelaskan bahwa tidak semua bangsa membangun *Sea power*. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun *Sea power* (Mahan 1890) seperti:

### 1. Letak Geografi (*Geographical Position*)

Letak geografi suatu negara terdapat dua aspek penting untuk dipahami. Pertama, letak suatu negara yang berhadapan dengan banyak lautan dengan komunikasi antara bagiannya yang berjalan secara baik sehingga musuh sulit untuk menaklukkannya. Kedua letak suatu negara berupa kepulauan yang ada di depan suatu benua atau daratan, sehingga seperti membentengi daratannya.

### 2. Bangun Muka Bumi (*Physical Conformation*)

Tata letak suatu negara bentuk atau wujudnya yang merupakan negara kepulauan dengan pantai-pantai yang bisa dicapai dari pedalaman pulaunya. Dalam hal ini, pelabuhan-pelabuhan alam yang dimiliki negara bersangkutan berfungsi serta menguntungkan (perdagangan maupun angkatan laut).

### 3. Luas Wilayah (*Extent of Territory*)

Luas wilayah adalah hubungan antara panjangnya garis pantai dengan sulit-mudahnya wilayah negara tersebut dipertahankan di masa perang.

### 4. Karakter Masyarakat (*Character of The People*)

Kecintaan atas tanah air atau nusa dan bangsa, kebanggaan kebesaran sejarah masa lampau, ikut menentukan kuat lemahnya suatu negara. Negara-negara yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap tanah air, dan memiliki kebanggaan atas kebesaran sejarah bangsa.

### 5. Jumlah Penduduk (*Number of Population*)

Penduduk dalam hal ini lebih ditekankan pada kuantitas. Makin banyak penduduk semakin cukup tersedianya tenaga untuk menjadikan tentara darat maupun lautan. Namun jumlah penduduk yang banyak, kemudian diimbangi dengan kualitas yang menjadikan negara ini bersangkutan memiliki kekuatan yang besar, karena tentara yang direkrut memiliki kualitas yang baik.

### 6. Karakter Pemerintahan (*Character of Government*)

Hal ini berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah internal negara (wilayah),

pemanfaatan kepadatan penduduk dan sikap atas negara tetangga. Negara yang memiliki pemerintahan yang kuat dan kebijaksanaan yang tegas akan lebih memanfaatkan kepadatan penduduknya untuk menjadi kekuatan yang menjadikannya berkembang kearah kemajuan.

Kejadian di laut sangatlah mempengaruhi kejadian darat. Namun sering kali keputusan-keputusan politik yang diambil berdasarkan kejadian-kejadian di darat, jarang mempertimbangkan aspek maritim. Mahan ini menggarisbawahi, *Sea Power* (Kekuatan Laut) merupakan unsur yang sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa. Sebaiknya apabila kekuatan-kekuatan di laut kurang diberdayakan, akan berakibat sangat merugikan negara atau meruntuhkan bangsa tersebut. Mahan menyatakan, bahwa Kekuatan Laut adalah “*All That Tends To Make A People Great Upon The Sea Or By Sea*”.

### **Realisme dalam Hubungan Internasional**

Munculnya perspektif realisme adalah suatu respon dari terjadinya kegagalan yang dilakukan perspektif liberalisme karna tidak dapat mencegah terjadinya perang dunia kedua. Asumsi dasar dari perspektif realisme datang dari realisme klasik yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya watak dasar dari manusia adalah egoistik dan agresif. Realisme memiliki asumsi bahwa negara-bangsa adalah aktor utama dalam hubungan internasional, karena negara adalah suatu aktor kesatuan, serta realisme mengasumsikan bahwa pembuat keputusan merupakan aktor rasional dalam artian bahwa yang dapat membuat keputusan secara rasional tergantung pada pencapaian nasional yang akan didapatkan oleh negara tersebut. Kemudian realisme digunakan sebagai salah satu perspektif utama di teori hubungan internasional karena terdapat point-point penting, diantaranya ialah:

1. Negara adalah sebagai peran utama dalam hubungan internasional.
2. Menjalin hubungan internasional negara mengutamakan kepentingan nasionalnya dari pada kepentingan negara lain.
3. Terdapat perbedaan diantara politik luar negeri dan politik dalam negeri karena terdapatnya pola atau struktur analisis yang tidak sama diantara politik luar negeri dan politik dalam negerinya.
4. Tujuan di dalam menjalin hubungan antar negara ialah berusaha untuk memperoleh kejayaan atau kekuasaan.
5. Adanya pandangan pesimistis atas sifat manusia.

Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional sehingga dapat memperhitungkan *Cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional, dalam politik luar negeri suatu negara yang menggunakan paham realisme yang dapat dilihat atas dasar pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateralis (*Unilateralism*). Nasionalis (*Nationalism*), strategy penangkalan, *Deterrence*, pertimbangan kekuatan (*Balance of power*), dan aliansi-aliansi pertahanan (*Defence alliances*).

Realisme ini menekankan bahwa negara-negara bangsa dijadikan sebagai unit analisisnya dan ini pula yang paling pokok, dalam hal penggunaan konsep *Power* dianggap sama dengan anggapan teori realisme: yakni dengan dasar teori realisme adalah kemampuan di dalam kekuatan militer, dalam kerangka analisisnya realisme yang mencoba menimbang kekuatan nasional yang tidak hanya terdiri dari kekuatan militer dan tingkat senjatanya namun juga faktor penduduk, geografis, sumber daya alam, bentuk-bentuk pemerintahan, kepemimpinan politik, dan faktor ideologisnya.

Realisme ini menunjukkan bahwa pemimpin, tidak peduli apa tujuan politik mereka, mengerti bahwa merupakan upaya untuk mengelola urusan negara mereka sehingga dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang kompetitif akhirnya, negara-negara hidup dalam konteks anarki, dalam ketiadaan siapa pun yang dapat dijadikan andalan secara internasional. Dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan regional negara-negara di

ASEAN, akan tetapi juga oleh keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang berupaya mempertahankan dan memperluas pengaruhnya. Dalam konteks Laut China Selatan, pertarungan kepentingan ini menjadi kompleks karena mencakup ekonomi, militer dan legitimasi hukum internasional tumpang tindih (B. S. Hadiwinata (2018)).

Toeri Hubungan Internasional, terdapat tiga varian utama dalam perspektive realisme jika mengacu pada unit analisis, diantaranya (Jackson 2016):

1. *Human-Nature Realisme*

*Human-Nature Realisme* ini merupakan suatu cara pandang mengenai sifat dasar manusia yang pada dasarnya adalah jahat, beberapa ahli pemikir hubungan internasional.

2. *State-Centric Realisme*

*State-Centric Realisme* adalah salah satu cara pandang terhadap lingkup hubungan internasional serta sikap-sikap suatu negara yang dapat dilihat dari hal-hal penting dalam suatu negara, seperti kepentingan nasional, keamanan nasional dan kekuatan militer negara.

3. *System-Centric Realisme*

*System-Centric Realisme* adalah salah satu cara pandang untuk melihat suatu negara yang terlibat dalam sistem internasional yang anarki.

Selain ketiga varian tersebut, realisme mempunyai varian berbeda yang lebih dominan dalam hubungan internasional yaitu, pertama realisme klasik, dan kedua realisme struktural. Perbedaan dari kedua varian ini ialah dalam penggunaan tingkat analisis. Realisme klasik lebih kepada penggunaan analisis terhadap suatu negara (Waltz (1979)). Sedangkan kedua realisme struktural ini menggunakan analisisnya terhadap sistem internasional. Terdapat dua varian utama dalam realisme struktural yaitu *defensive realism* dan *offensive realism*. Ciri-ciri utama dari realisme struktural yaitu (J. Mearsheimer 2001):

1. Adanya suatu kejadian yang dapat dijelaskan dan mempunyai pengaruh terhadap sistem suatu negara serta adanya upaya dari negara tersebut.
2. Bertujuan hanya untuk menganalisis suatu sistem
3. Semua negara dipandang memiliki tujuan yang sama hal diasumsikan bahwa pada dasarnya setiap negara mempunyai kepentingan yang sama yakni agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.
4. Kekuatan (*power*) merupakan suatu hal yang mutlak yang digunakan untuk mendapatkan kepentingan nasional suatu negara.

Varian utama dalam realisme struktural yaitu: *defensive realism and offensive realism* sama-sama setuju terhadap keempat ciri tersebut, tetapi perbedaan diantara *defensive realism* dan *offensive realism* terletak pada cara menyikapi kekuatan dan perilaku suatu negara (Perwita (2017)). Adanya peningkatan dan perkembangan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh kaum behavioralis yang mana mereka telah menciptakan suatu paham baru yaitu Neorealisme di dalam dunia hubungan internasional.

Perkembangan dari paham ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik dalam hubungan internasional yang mana paham ini telah menjadi paradigma baru dalam hubungan internasional yang makin berkembang dan kemudian Neorealisme ini terbagi menjadi dua paradigma yang sangatlah penting yaitu: *Defensive Realism and Offensive Realism*. (B. Hadiwinata 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif karena relevan saat menggambarkan dan menganalisis dinamika geopolitik dan strategi kebijakan luar negeri melalui pemahaman mendalam terhadap teks, data sekunder, dan dokumen resmi. Pendekatan kualitatif ini

bertujuan memahami fenomena sosial dan politik dalam konteks aslinya melalui interpretasi makna yang dikonstruksi oleh pelaku dalam realitas tersebut. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian yang secara holistik (Moleong 2017).

Pendekatan deskriptif-analitis yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis di rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut China Selatan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kepentingan nasional Indonesia dari sisi politik luar negeri, dan pertahanan.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah analisis terhadap dinamika rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut China Selatan, serta implikasinya terhadap kepentingan strategis Indonesia, baik dari sisi politik luar negeri, keamanan nasional, maupun kedaulatan wilayah. Fokus ini dibagi ke dalam beberapa subaspek utama:

1. Strategi geopolitik dan militer AS–RRT dalam mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di kawasan Laut China Selatan.
2. Ekspansi maritim, militerisasi wilayah yang dilakukan oleh RRT serta respons strategis dari AS di dalam bentuk diplomasi, aliansi militer, dan operasi kebebasan navigasi (*Freedom of Navigation Operations*).
3. Dampak rivalitas terhadap kepentingan Indonesia, terutama dalam hal klaim sepihak Tiongkok terhadap wilayah yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.
4. Respons dan kebijakan luar negeri Indonesia agar menjaga kedaulatan, keamanan wilayah, serta peran aktifnya di kawasan ASEAN.

Fokus bersifat strategis karena Laut China Selatan adalah jalur perdagangan internasional yang sangat penting (lebih dari USD 3 triliun nilai perdagangan setiap tahun), memiliki potensi besar dalam aspek sumber daya alam dan geostrategi. Laut China Selatan adalah kawasan yang memiliki nilai geostrategis dan geoekonomi tinggi, sehingga menjadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia (Kaplan 2011). Dinamika geopolitik Asia Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh negara-negara di kawasan, akan tetapi juga oleh kekuatan besar seperti AS dan RRT yang berupaya mempertahankan serta memperluas pengaruh global melalui di Laut China Selatan. Pertarungan kepentingan di Laut China Selatan yang mencerminkan persinggungan dimensi ekonomi, militer, dan hukum internasional antara dua kekuatan besar yang saling tumpang tindih dengan kepentingan nasional negara ASEAN Indonesia (Hadiwinata (2018)).

### **Sumber Data Penelitian**

Penelitian menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder karena karakteristik topik penelitian menekankan pada kajian geopolitik, kebijakan luar negeri, dan hubungan internasional yang didominasi oleh dokumentasi tertulis, baik berupa publikasi ilmiah, laporan resmi negara bahkan organisasi internasional. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumentasi tertulis yang telah dipublikasikan atau tersedia dalam bentuk rekaman, laporan, arsip, dan sejenisnya (Bungin 2017).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder berasal dari dokumentasi yang telah tersedia dan digunakan sebagai dasar analisis dan pemahaman terhadap objek kajian lebih jelasnya, yaitu (Bungin 2017):

1. Buku dan Literatur Akademik

Data ini mencakup buku-buku teori hubungan internasional, geopolitik, strategi maritim, serta literatur dan peran Indonesia di kawasan tersebut.

5. Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional.

Artikel akademik jurnal, seperti: *Journal of Contemporary Southeast Asian Affairs*, *Maritime Affairs*, *Indonesian Quarterly* yang digunakan untuk memahami pendekatan mutakhir di dalam kajian geopolitik dan strategi.

6. Laporan Resmi dan Dokumen Pemerintah

Termasuk laporan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan RI, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, dokumen dari ASEAN, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, dan Dewan Keamanan PBB juga dijadikan rujukan.

7. Siaran Pers dan Pernyataan Resmi

Data-data berupa pidato pejabat tinggi negara (Presiden, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI), serta pernyataan resmi dari pemerintah AS-RRT, dan ASEAN mengenai Laut China Selatan.

8. Media Massa dan Portal Berita Terpercaya

Artikel dari media seperti *The Diplomat*, *South China Morning Post*, *Kompas*, dan *BBC Indonesia* yang digunakan sehingga mendapatkan informasi aktual, tanggapan dan opini mengenai kebijakan luar negeri dan konflik regional.

### **Teknik Analisis Data**

Data-data dianalisis menggunakan metode analisis isi kualitatif, yakni dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan makna dari dokumen serta teks relevan dengan fokus penelitian. Peneliti mencari pola-pola strategi, respon kebijakan, serta narasi dominan yang menggambarkan dinamika hubungan antara AS-RRT, bahkan Indonesia di Laut China Selatan. Analisis ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana Indonesia memosisikan diri dalam sistem internasional yang didominasi rivalitas kekuatan besar, serta bagaimana strategi diplomasi Indonesia membentuk dan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik tersebut (Neuman 2014).

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu: (Miles 1984).

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk kepada pemilihan, pemfokusan, penyederhanan, abstraksi dan pentransformasian “Data mentah” yang terjadi di dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek diorientasikan pada kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Tujuan penyajian data ini adalah agar data yang berupa sekumpulan informasi yang tersusun lebih mudah untuk dipahami dengan penyajian data yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan

Penarikan data verifikasi simpulan didapatkan permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna suatu mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, proporsi-proporsi sehingga menjadi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

### **Rencana Uji Keabsahan Data**

Cara menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasidan referensi.

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan akurat, yaitu:

#### Referensi

Menggunakan bahan referensi dalam penelitian merupakan adanya pendukung untuk membuktikan data-data yang telah ditemukan peneliti (Surwati 2008). Referensi digunakan sebagai pendukung yang akan membuktikan jika data yang didapat oleh peneliti dinyatakan valid. Adapun bahan pendukung yakni gambar dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh negara.

#### Triangulasi

Penelitian ini menggunakan triangulasi dimana sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakan untuk membangun justifikasi secara koheren. Pemeriksaan ini menggunakan: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari wawancara. Sumber sekunder terdiri dari; buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, dan berita online yang berkaitan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu kawasan yang paling strategis dan kontroversial dunia dalam geopolitik global, karena meningkatnya rivalitas antara kekuatan besar dunia, yaitu: Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kawasan ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan hasil perikanan, tetapi juga menjadi jalur pelayaran utama dunia, di mana sekitar sepertiga perdagangan global melewati wilayah ini setiap tahunnya (R. D. Kaplan (2014)).

RRT juga mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan *Nine-Dash Line* yang tidak diakui secara internasional. Klaim bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan telah ditolak oleh putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di tahun 2016 dalam kasus yang diajukan Filipina. Meski demikian, RRT terus memperkuat posisinya di kawasan tersebut dengan membangun pangkalan militer, fasilitas sipil, serta memperluas pulau buatan di wilayah sengketa (Hayton 2018).

Di sisi lain, AS tidak memiliki klaim langsung di Laut Cina Selatan, tetapi menegaskan kepentingan menjaga kebebasan navigasi (*Freedom of navigation*) dan hukum internasional. AS secara konsisten melakukan operasi di kebebasan navigasi *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) sebagai bentuk penolakan terhadap klaim maritim RRT yang dinilai berlebihan. Pendekatan ini mencerminkan strategi AS untuk membendung pengaruh RRT pada kawasan Asia-Pasifik dan mendukung sekutu-sekutunya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia (Green 2017).

Rivalitas antara AS dan RRT di Laut Cina Selatan tidak hanya mencerminkan konflik teritorial, akan tetapi juga pertarungan hegemoni dan pengaruh global. RRT menggunakan pendekatan "*Salami Slicing*" yang merupakan memperluas pengaruh secara bertahap dan konsisten, sementara AS mengedepankan pendekatan diplomasi maritim dan militer untuk mempertahankan tatanan berbasis aturan internasional. Rivalitas ini telah memicu ketegangan militer, manuver kapal perang, dan eskalasi diplomatik, yang pada gilirannya meningkatkan potensi konflik terbuka jika tidak dikelola dengan bijak (A. L. Friedberg 2011)

Lebih jauh, dinamika ini memiliki implikasi strategis yang luas bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Meski Indonesia bukan pihak yang mengklaim Laut Cina Selatan secara langsung, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara kerap diklaim oleh RRT, menimbulkan friksi diplomatik. Indonesia, seperti: banyak negara lain, dihadapkan pada dilema strategis: menjaga hubungan baik dengan RRT sebagai mitra ekonomi, namun juga mempertahankan kedaulatan dan hukum laut internasional.

Penguasaan strategis atas Laut China Selatan yang mendorong rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah berdasarkan “*Nine-dash line*” termasuk area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, meskipun Indonesia menyatakan tidak ada klaim tumpang tindih secara formal dari AS mendukung FOIP (*Free and Open Indo-Pacific*) sebagai tandingan dengan tujuannya dan berupaya menegakkan supremasi hukum laut dan kebebasan navigasi.

Keaktifan china di mulai pada tahun 2010 dalam mengakui 88% wilayah Laut China Selatan (LCS) termasuk sebagian perairan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (Aspistrategist.org 2020).

1. Laut China Selatan adalah perairan dunia yang menjadi urat nadi sistem pelayaran yang menghubungkan samudra hindia dan samudra pasifik.
2. Ditengah potensi dari krisis energi di dunia dibawah Laut China Selatan terkandung sumber daya alam, yakni minyak bumi dan gas alam dengan jumlah yang relatif besar.
3. Negara dengan ekonomi yang relatif besar, teknologi, dan militer, china berperilaku layaknya Hegemoni regional yang cenderung memaksakan kepentingannya kepada negara lain yang lebih lemah.

Klaim *Dashed Lines* secara sepihak RRT direspon Amerika dan koalisinya dengan konsep di *Free And Open Indo Pacific* (FOIP) yang ditentang China karena menganggap sebagian besar LCS ialah perairan teritorial RRT, sementara Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN menawarkan konsep tandingan *Free And Open Indo Pacific* yang dinamakan *Asean Outlook for Indo Pasifik* dengan tujuan membangun perdamaian dunia, keamanan yang berorientasi yang bertujuan untuk menghindari konflik dan mengedepankan diplomasi damai (Asean.org 2021).

Sengketa Laut China Selatan telah menjadi isu sentral di kawasan indo pasifik karena melibatkan rivalitas antar negara adidaya, seperti: Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Konflik ini dimulai terjadi pada tahun 2012, saat itu RRT secara asertif mengakui bahwa peta laut yang dilansir Tahun 1948 dan pada saat itu disetujui AS dan RRT karena masih dikuasai kelompok Nasionalis. Wilayah perairan yang diakui bernama ‘Sembilan Garis Putus’ menuai sengketa dengan lima negara yang mengklaimnya, yakni Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darusalam. Akan tetapi, permasalahan sengketa ini menyeret negara-negara besar, seperti” Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India karena memiliki kepentingan geopolitik dan geoekonomi di laut china selatan (RRT) (Asean.org 2021).

Mempertahankan wilayahnya, Indonesia mengkaji secara seksama dinamika yang terjadi di LCS karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang harus memanfaatkan forum ASEAN, yakni *East Asian Summit* (EAS) dan *Asean Regional Forum* (ARF) untuk menurunkan tensi keamanan di Asia Timur dan secara parallel menambah kohesi dan sentralitas menawarkan resolusi yang efektif untuk sengketa di LCS, agar Indonesia tetap menjaga hubungan diplomasi yang kuat dengan RRT, dengan upaya agar menghindari permasalahan antara AS-RRT yang dapat dianggap berasal dari dilema tentang komitmen jangka panjang terhadap AS.

Di sisi lainnya Indonesia akan menghindari masuk ke dalam aliansi dan akan terus berhubungan baik dengan AS-RRT. Indonesia yang menempatkan diri selaku negara yang menjaga stabilitas regional dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan penguatan institusi regional berharap tidak terlibat serta membatasi AS-RRT kerana AS-RRT adalah negara yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi serta keamanan Indonesia di kanca internasional, maka dari itulah Indonesia mengambil langkah untuk tidak berpihak ke pihak manapun, hal ini yang menjadikan Indonesia makin kuat untuk menengahi konflik AS-RRT (Asean.org 2021).

## **Interaksi Indonesia dalam Situasi Geopolitik**

Indonesia menempuh kebijakan *non-blok* yang berfungsi sebagai mediator di ASEAN bahkan menolak klaim sepihak RRT sambil menjalin kerja sama ekonomi antara AS-RRT sebagai negara adidaya dengan melakukan patroli dan penangkapan kapal nelayan Tiongkok Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna. Laut Cina Selatan adalah wilayah perairan strategis yang kaya akan sumber daya alam serta sengketa yang dianggap paling panas di Abad ke-21. Ketegangan Laut Cina Selatan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kedaulatan Indonesia, khususnya terhadap Pulau Natuna yang rentan terhadap ancaman eksternal (BBC.com 2020).

Kepedulian utama Indonesia ialah menjaga keamanan negara dan melindungi wilayah perairannya dari perambahan negara lain, termasuk Tiongkok. LCS adalah area persaingan kekuatan besar, dimana RRC ini menegaskan dominasinya melalui pembangunan militer dan pembangunan pulau buatan, sementara AS dan sekutunya mendukung kebebasan navigasi dan supremasi hukum. Sedangkan untuk Indonesia, tarik menarik geopolitik ini memerlukan tindakan penyeimbangan yang rumit. Di satu sisi, Indonesia berupaya untuk mempertahankan sikap tradisional *non-blok* dan menghindari provokasi RRC serta mitra dagang utama. Di sisi lain ia harus menjaga integritas teritorial dan kepentingan ekonominya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Natuna, melakukan latihan angkatan laut dan meningkatkan infrastruktur (Peaceful-competition.org 2020).

Pemerintah Presiden Joko Widodo juga telah melakukan inisiatif diplomatik untuk menggalang dukungan ASEAN terhadap respons kolektif terhadap ketegangan Tiongkok (Time.com 2021). Namun, pendekatan ASEAN yang berbasis konsensus dan beragamnya kepentingan negara-negara anggotanya mempersulit rumusan sikap secara terpadu. Tanggapan Indonesia terhadap ketegangan di Laut Cina Selatan mempunyai banyak aspek yang menggabungkan keterlibatan diplomatik, tindakan hukum, dan kesiapan militer.

Di Jakarta telah mengajukan protes secara resmi terhadap serangan RRC dan menekankan betapa pentingnya *United Nations Convention On the Law Of The Sea* (UNCLOS) dalam menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak.

Pada tahun 2016, Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya menjadi Laut Natuna Utara untuk menegaskan kedaulatannya. Maka dari itulah, jalur hukum tetap menjadi komponen penting dalam strategi Indonesia yang secara konsisten mengadvokasi penyelesaian sengketa secara damai melalui hukum internasional (Arbitration n.d.)

Putusan Pengadilan Tetap *Arbitrase* di Tahun 2016 yang membatalkan klaim sembilan garis putus-putus RRC, memperkuat posisi hukum di Indonesia meskipun RRC menolak putusan tersebut. Penolakan berdampak pada ketegangan Laut Cina Selatan terhadap kedaulatan Indonesia akan terus berkembang. Lanskap geopolitik yang berubah-ubah dengan perubahan aliansi dan yang memunculkannya ancaman. Kemampuan Indonesia agar mengatasi kompleksitas bergantung kepada ketajaman diplomasi, kemampuan militer bahkan kemitraan regional dengan cara memperkuat persatuan ASEAN serta meningkatkan kerja sama maritim yang akan menjadikan hal yang sangat penting.

Peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN menempatkan Indonesia sebagai ujung tombak inisiatif yang mendorong stabilitas serta kepatuhan terhadap hukum internasional di Laut Cina Selatan (Singh, V., & Rana, C. (2024). Pada saat yang sama, memperkuat kemampuan pertahanan dan meningkatkan pengawasan sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ringkasnya ketegangan Laut Cina Selatan berimplikasi secara signifikan atas kedaulatan Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan wilayah perairannya dan Pulau Natuna.

Strategi Indonesia meliputi penguatan keamanan maritim, partisipasi dalam organisasi regional, dan penerapan pendekatan diplomatik untuk mencegah eskalasi ketegangan menjadi

konflik bersenjata (Aspistrategist.org 2020) Perselisihan akan tunduk kepada hukum internasional, dan pendekatan Indonesia difokuskan pada kerja sama dan diplomasi untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Laut Natuna. Sengketa Laut Cina Selatan ditandai dengan klaim kepemilikan sepihak oleh RRC yang menggunakan prinsip sembilan garis putus-putus dan kekuatan maritim sehingga memicu respons dari negara sekitar, termasuk di Indonesia. Strategi Indonesia mengatasi ketegangan ialah dengan memperkuat kapasitas penegakan dan komando keamanan maritim di berbagai lembaga penegak hukum maritim Indonesia dan partisipasi saat organisasi regional, seperti: ASEAN yang tidak terbatas ke penggugat secara langsung.

Hal ini melibatkan banyak negara yang memiliki kepentingan di Laut Natuna yang secara tidak langsung terlibat kepentingan besar agar bisa menjaga keamanan wilayah perairannya. Pendekatan Indonesia terhadap perselisihan difokuskan pada diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara ASEAN dengan tujuan mencegah konflik bersenjata. Laut Cina Selatan dianggap sebagai rezim maritim internasional, yang tunduk pada prinsip dan praktik Hukum Internasional, khususnya di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Hukum Laut *United Nations Convention On the Law Of The Sea* (UNCLOS). Segala upaya nasionalisasi Laut Cina Selatan akan ditolak berdasarkan hukum internasional, yakni yang terlihat dalam keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) pada tahun 2016 tentang perselisihan antara Filipina dengan RRC, dengan memperkuat kekuatan “*Soft Assertiveness*”.

### **Strategi Respon Nasional Berdasarkan *Analytic Hierarchy Process***

Metode *Analytic Hierarchy Process* menunjukkan tiga strategi utama: (Saaty 2014).

#### a. Penguatan Kemandirian Ekonomi Nasional

Geopolitik saat ini, yang mengharuskan kemandirian ekonomi nasional bukan hanya sekadar kebijakan yang bersifat makro, akan tetapi dalam hal ini menjadi instrumen strategis kedaulatan.

#### b. Ketahanan Teknologi dan Industri Strategis

Ketahanan teknologi dan industri strategis saat ini mengacu pada kemampuan pada negara agar mempertahankan dan memperkuat sektor teknologi tinggi dan industri penting (seperti semikonduktor, AI, energi terbarukan, telekomunikasi) secara mandiri yang mencakup kemandirian riset, produksi dan inovasi tanpa tergantung kepada pasokan dari pihak luar dengan tujuannya untuk menjaga kedaulatan nasional, memastikan keamanan ekonomi dan memberikan ruang strategis saat situasi tekanan geopolitik, seperti sanksi atau embargo teknologi dari negara adidaya dan negara-negara Eropa dengan melakukan kebijakan “*Made In China 2025 and 863 Program*”.

Melalui *Made In China 2025*, RRT menetapkan target inti: 70% konten domestik semikonduktor dan automasi tinggi lewat AI, robotika, dan manufaktur canggih dikarenakan selama beberapa dekade terakhir, lanskap global penelitian teknologi telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun AS pernah mendominasi di bidang strategis, RRT secara bertahap mulai mengambil alih, menjadi pemimpin dunia dalam berbagai teknologi penting saat ini (Saaty 2014).

Laporan terbaru dari *Australian Strategic Policy Institute* (ASPI) menyoroti pergeseran penting ini, yang menunjukkan bahwa RRT kini memimpin dalam sekitar 90% teknologi utama dunia, secara signifikan melampaui AS (Saaty 2014). Pergeseran posisi antar dua raksasa global memiliki implikasi yang sangatlah penting bagi masa depan inovasi, keamanan, dan ekonomi global.

Awal abad ke-21, RRT ini telah melesat ke depan, membalikkan peran AS. Laporan ASPI, “*Pelacak Teknologi Kritis*” mengungkapkan bahwa RRT ini memimpin hanya dalam 5% teknologi antar tahun 2003 dan 2007, akan tetapi saat ini RRT memimpin 57 dari 64 teknologi kritis yang dilacak selama 5 tahun terakhir. Sebaliknya AS yang mendominasi 94% dari teknologi di awal

tahun 2000-an, sekarang hanya memimpin di 11%, yang mewakili 7 bidang dari 64 bidang (Saaty 2014). Pelacakan pada ASPI meninjau kembali daya saing negara berdasarkan frekuensi di makalah ilmiah yang paling berpengaruh di bidang teknologi. Peringkat ini tidak hanya mencerminkan volume penelitian yang dihasilkannya akan tetapi juga kualitas dan dampak globalnya.

Kinerja RRT bidang ini sangatlah spektakuler memungkinkannya memimpin dalam berbagai bidang, seperti: sensor kuantum, komputasi kinerja tinggi, sensor gravitasi, peluncuran luar angkasa, desain sirkuit terintegrasi canggih, dan fabrikasi semikonduktor (Center for Strategic and International Studies (CSIS) 2020).

Kebangkitan kekuatan teknologi RRT ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang saling berhubungan. Salah satunya ialah investasi besar negara ini di dalam infrastruktur penelitian, membangun institusi-institusi canggih, yakni *Akademi ilmu pengetahuan China*. Institusi saat ini memimpin 31 dari 64 teknologi penting dunia dengan memberikan contoh pendekatan RRT saat menggabungkan volume penelitian yang tinggi dengan keunggulan ilmiah untuk mendominasi bidang strategis, seperti yang disoroti oleh Bank Dunia, pengeluaran Litbang China yang relatif terhadap PDB yang terus meningkat, mempersempit kesenjangan dengan AS dari 1,89% menjadi 1,03% pada tahun 2020 (Center for Strategic and International Studies (CSIS) 2020).

Bulan Maret 2024, pemerintah RRT mengumumkan peningkatan lebih lanjut sebesar 10% pada pengeluaran sains dan teknologi (British Council). Meskipun AS masih mempertahankan keunggulan signifikan, dengan \$ 806 Miliar yang dihabiskan untuk melakukan penelitian dan pengembangan di tahun 2021, dibandingkan dengan \$. 668 Miliar yang dihabiskan oleh RRT. Sementara itu, Uni Eropa tertinggal di belakang, dengan pengeluaran litbangnya 40% lebih rendah daripada RRT, yakni yang dilaporkan oleh *Science Business*. Untuk lebih jelasnya, yaitu: (Goh 2019)

Indikator utama untuk menilai hasil litbang adalah aktivitas paten, di mana RRT memimpin secara global. Tahun 2022 RRT mengajukan 1.619.268 paten, yang meningkat 2,1% dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, AS mengajukan 594.340 paten, menandai pertumbuhan 0,5% (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, WIPO). Ukuran penting lainnya dari kepemimpinan teknologi adalah jumlah doktor baru yang dihasilkan tiap tahunnya. Di Tahun 2020, RRT memimpin dengan 3,57 juta doktor baru, diikuti India dengan 2,55 juta, sementara AS tertinggal dengan 820.000, seperti yang dicatat *Center for Security and Emerging Technology*.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Presiden Xi Jinping mengenalkan OBOR atau yang sekarang dikenal dengan BRI pada 2013. BRI merupakan ambisi besar Presiden Xi Jinping untuk menghidupkan kembali jalur sutra kuno dan meningkatkan kerjasama dengan Afrika, Eropa, Timur Tengah, serta Asia Selatan, Tengah dan Tenggara.

China membentuk enam koridor internasional dan jalur sutra maritim untuk menjalankan misi BRI. Secara geografis, Australia tidak termasuk ke dalam salah satu koridor yang dilalui proyek BRI. Namun, untuk meningkatkan perannya di Kawasan Indo-Pasifik China secara resmi mengundang Australia untuk bergabung dalam proyek BRI.

Kebangkitan China di kawasan Indo-Pasifik justru menjadi ancaman bagi Australia. Selain karena ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, Australia juga khawatir utang yang diberikan China pada kawasan tersebut dapat menyebabkan destabilisasi kawasan. China memberikan pinjaman dana untuk pembangunan proyek infrastruktur dengan bunga yang

sangat tinggi. Tingginya suku bunga yang ditetapkan dikhawatirkan dapat menyebabkan negara penerima sulit membayar dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

China juga kerap mengalokasikan militernya sebagai upaya pengamanan pembangunan proyek infrastruktur, tidak jarang pengalokasian militer ini juga menjadi konsekuensi yang harus ditanggung suatu negara jika gagal melakukan pembayaran utang ketika sudah jatuh tempo. Untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, Australia menolak tawaran China untuk bergabung dalam proyek BRI. Australia justru bergabung dalam BDN, inisiatif baru tandingan BRI, bersama Amerika Serikat, Jepang dan India.

BDN mengkritik ketidaktransparanan BRI dalam mengelola proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, BDN menganggap pendanaan proyek infrastruktur tersebut membuat suatu negara ketergantungan dengan China. Hal ini disebabkan kualitas infrastruktur yang tidak sesuai standar sehingga umur infrastruktur lebih pendek dari yang seharusnya, sehingga negara tersebut harus melakukan perbaikan dan pengeluaran menjadi lebih besar. China juga memasukkan komponen teknologi yang pemeliharaan dan pengoperasiannya sulit dilakukan oleh negara penerima bantuan, sehingga negara tersebut harus bergantung dengan China untuk pemeliharaan dan pengoperasiannya.

Victoria, salah satu negara bagian Australia, secara diam-diam mengambil langkah kontroversial. Di bawah kepemimpinan Daniel Andrews, Victoria secara resmi menandatangani MoU kerjasama BRI pada 2018. Di tahun berikutnya, Victoria dan China memperkuat kerjasama tersebut dengan penandatanganan kerangka kerja. Kedua perjanjian yang dibuat Victoria dengan China dilakukan tanpa berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Canberra. Tindakan Victoria telah melangkahi pemerintah federal Australia dalam mengambil kebijakan luar negeri. Hal ini membuat pemerintah federal mengambil keputusan untuk membuat Undang-Undang Hubungan Luar Negeri baru yang memungkinkan pemerintah federal mengubah atau membatalkan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara bagian atau otoritas wilayah dengan entitas asing jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Australia.

Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang membuat Australia membatalkan perjanjian BRI dengan China. Pertama, ancaman militer China di kawasan Indo-Pasifik. Kedua, keikutsertaan Australia dalam BDN. Ketiga, disahkannya *Australia's Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Act 2020*, sehingga Menteri Luar Negeri memiliki wewenang untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian internasional yang dibuat oleh negara bagian atau otoritas wilayah dengan entitas asing jika perjanjian tersebut tidak konsisten dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Australia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bungin, B. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana

Creswell, J. W. 2018. *Qualitative Methode Approaches*.

Friedberg, A. L. 2022. *Getting China Wrong*. Polity Press.

Friedberg, A. L., 2011. *A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia*. W. Norton & Company.

- Hadiwinata, B. S. (2018). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Global*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwinata, B.S. 2018. *Geopolitik Kawasan Asia Tenggara: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nasional.
- Hayton, B. 2018. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Yale University Press.
- Jackson, R., & Sørensen, G. 2016. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches (6th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House.
- Mahan, A. T. 1890. *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. Boston: Little, Brown and Company.
- Margesson, Rhoda. 2010. *United Nations Assistance Mission in Afghanistan : Background and Policy Issue*. Washington DC: CSR Report for Congress.
- Mearsheimer, J. J. 2011. *Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W Norton & Company.
- Mearsheimer, J.J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Norton & Company.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Surwati, Basorwi dan. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tanner, Stephen. 2002. *Afghanistan : A Military History From Alexander the Great ti the fall of the Taliban* . Cambridge: Da Capo Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Teory of International Politics*. Reading. MA: Addison-Wesley.

## **Internet**

- Abou-Zahr, Sawssan. 2019. *Peace Dispatch: March 2019*. Maret 23. Accessed Januari 27, 2024. <https://www.peaceinsight.org/en/articles/peace-dispatch-march-2019/?location=nigeria&theme=conflict-prevention-early-warning>.
- Adam, Chaesar. 2018. *Respon Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok: Dilema Pemenuhan Kepentingan Ekonomi dan Keamanan Nasional*. Yogyakarta: UGM.
- Anwar, D. F. 2020. "Indonesia's South China Sea Dilemma: Between Sovereignty and Economic Relations." ISEAS Perspective, No. 15.
- Aoyama, Rumi. 2017. "One Belt, One Road: Tiongkok's New Global Strategy." *Journal of Contemporary East Asia Studies* Vol 5:2.

- Arbitration, Permanent Court of. n.d. "(2016). Award: Philippines v. China (PCA Case No. 2013-19). Menggarisbawahi bahwa klaim "Historic rights" Tiongkok dalam nine dash line tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS."
- Asean.org. 2021. *ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific FINAL*. [https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf?utm](https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf?utm).
- Aspistrategist.org. 2020. *mapping-the-nine-dash-line-recent-incidents-involving-indonesia-in-the-south-china-sea*. <https://www.aspistrategist.org.au/mapping-the-nine-dash-line-recent-incidents-involving-indonesia-in-the-south-china-sea/?utm>.
- Ayoma, Rumi. 2017. "One Belt, One Road: Tiongkok's New Global Strategy." *Journal of Contemporary East Asia Studies*, Vol 5:2.
- BBC.com. 2020. *Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466?utm>.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2020. "How Much Trade Transits the South China Sea?"
- Chun, Chieng-Peng. 2022. *Tiongkoks's Multilateral Cooperation In Asia and the Pacific: institutionalizing 'Good Neighbor Policy', (New York: Rutledge, 2010)*. Accessed 2025. di <https://www.routledge.com/Tiongkoks-Multilateral-Co-operation-in-Asia-and-the-Pacific-Institute>.
- Dupree, Louis, Nancy Hatch Dupree, and Victor Petrov. 2024. *Afghanistan; Etnolinguistic Composition*. Januari 12. Accessed Januari 27, 2024. <https://www.britannica.com/place/Afghanistan>.
- Goh, E. 2019. "'ASEAN's Role in the South China Sea Dispute.'" *Asian Survey*, Vol. 59, No. 3.
- Green, M. J., et al. 2017. "Countering Coercion in Maritime Asia: The Theory and Practice of Gray Zone Deterrence." Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Hartono, Willy. 2021. *Perjanjian AS-Taliban Buka Jalan Perdamaian di Afghanistan*. Maret 1. Accessed Januari 29, 2024. <https://www.medcom.id/internasional/timur-tengah-afrika/yNLGE06K-perjanjian-as-taliban-buka-jalan-perdamaian-di-afghanistan>.
- Hayton, B. 2018. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Yale University Press.
- International Crisis Group. 2020. *Afghanistan Peace Talk Since 2018: A Timeline*. Agustus 11. Accessed Januari 30, 2024. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-between-february-2019-and-august-2020-timeline>.
- Jurnal Politik. April 2023. "Keamanan dan Hubungan Internasional." *Nomor eISSN : 2829-1794 Volume 2 No. 1* 29-38.
- Peaceful-competition.org. 2020. *Peace*. <https://www.peaceful-competition.org/pub/brdt54wm/release/1?utm>.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). "The South China Sea Arbitration Award."
- Saaty, T. L. 2014. *Analytic Hierarchy Process*. <https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat05310>.
- Secretariat Cairo. 1995. "United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders."
- Shafitri, Desy Nur. 2024. "Respon ASEAN atas Keterlibatan Amerika Serikat di Laut." *Jurnal Ilmu Politik Vol.15, No. 1*.

- Sinaga, Yuni Arisandy. 2019. *Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian di Afghanistan*. Maret 15. Accessed Januari 30, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/810347/indonesia-siap-berkontribusi-proses-perdamaian-diafghanistan#>.
- Time.com. 2021. *indonesia-china-jokowi-natuna-sovereignty-maritime-fishing-dispute*. <https://time.com/4379401/indonesia-china-jokowi-natuna-sovereignty-maritime-fishing-dispute/?utm>.
- Varano, John. 2020. *The State of Victoria and China's Belt and Road Initiative: Where Does it Leave Victorians?* Accessed 2024. [https://www.researchgate.net/publication/341359556\\_The\\_State\\_of\\_Victoria\\_and\\_China's\\_Belt\\_and\\_Road](https://www.researchgate.net/publication/341359556_The_State_of_Victoria_and_China's_Belt_and_Road).
- Widyaningrum, Gita Laras. 2018. *Kronologis Serangan 9/11, Runtuhnya Menara Kembar dan Osama Bin Laden*. September 18. Accessed Januari 28, 2024. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13935227/kronologis-serangan-911-runtuhnya-menara-kembar-dan-osama-bin-laden>.